

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur apabila debitur menolak untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Dalam kondisi demikian, eksekusi wajib dilakukan melalui mekanisme peradilan guna menjamin perlindungan hukum dan prinsip keadilan bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 83/Pdt.G/2022/PN.Pbr terkait pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang masih berada dalam penguasaan debitur yang wanprestasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, dengan analisis terhadap penerapan norma hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek keadilan, perlindungan hukum yang seimbang, serta kepastian hukum dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia yang ditolak oleh debitur harus memperoleh izin atau penetapan dari pengadilan, sesuai dengan amanat konstitusional yang berlaku pasca Putusan MK.

Kata kunci: *jaminan fidusia, eksekusi, wanprestasi, Mahkamah Konstitusi, perlindungan hukum*

ABSTRACT

The Constitutional Court Decision No. 2/PUU-XIX/2021 affirms that the execution of fiduciary collateral objects may not be carried out unilaterally by the creditor if the debtor refuses to voluntarily surrender the object. Under such circumstances, execution must be conducted through judicial proceedings to ensure legal protection and uphold the principle of justice for both parties. This study aims to examine the judicial considerations in the Decision of the Pekanbaru District Court No. 83/Pdt.G/2022/PN.Pbr concerning the execution of fiduciary collateral still under the control of a defaulting debtor. The research applies a normative juridical approach and case study method by analyzing the application of legal norms following the Constitutional Court's decision. The findings indicate that the judge considered the principles of fairness, balanced legal protection, and legal certainty in rendering the verdict. The study concludes that, in accordance with constitutional mandates post-Decision No. 2/PUU-XIX/2021, the execution of fiduciary security objects contested by the debtor must obtain judicial authorization.

Keywords: *fiduciary security, execution, default, Constitutional Court, legal protection*